

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR KENCANA MANDIRI  
TAHUN 2025**



**Jl. Hayam Wuruk No. 53 Jelutung Jambi 36133  
TELEPON: 0741-7553320**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR KENCANA MANDIRI
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No. 53 Jelutung Jambi 36133
Nomor Telepon	0741-7553320

### Penjelasan Umum:

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka pentingnya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat. Melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik diharapkan BPR dapat terhindar atau meminimalkan dampak buruk atas risiko yang kemungkinan akan terjadi pada BPR.

Untuk penerapan suatu Good Corporate Governance yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

b. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya.

d. Independensi (Independency)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan/kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/ menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>3. Cukup Baik</b>
--	----------------------

**Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:**

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Jabatan	Direktur

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan
- b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain
- d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain
- f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank terus diupayakan pada posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK sebagian besar telah ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

**3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

1.	Nama	Djodi suhardi
	Jabatan	Komisaris

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.

**4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

BPR tidak membentuk komite audit, pemantau risiko, dan Remunerasi dan Nominasi

**5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

BPR tidak membentuk komite audit, pemantau risiko, dan Remunerasi dan Nominasi

**6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR**

**Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Djodi suhardi
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham dari Anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris pada BPR Kencana Mandiri

### 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Djodi suhardi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham dari Anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR Kencana Mandiri

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Djodi suhardi
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham dari Anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Djodi suhardi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat adanya hubungan Keuangan antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham

## 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Arie Kustiyarto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Djodi suhardi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat adanya hubungan keluarga antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp132.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp102.000.000

**1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp24.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

**1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

**1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

**1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan	Rp0

Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	<b>Rp0</b>

Komisaris (Rp)

#### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) **Rp0**

Direksi dan Komisaris menerima gaji/Honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **1,86 : 1**

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **0,00 : 1**

### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) **0,00 : 1**

### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) **1,53 : 1**

### 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,10 : 1**

Periode Desember 2025 Direksi BPR Kencana Mandiri berjumlah 1 Orang dan Komisaris 1 orang.

### 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	05 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pencapaian Kinerja bulan Januari dan Februari 2025. Pelaksanaan Operasional BPR khususnya terkait dengan Rasio Bank, kredit, dan Laba.		
2.	Tanggal Rapat	02 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pencapaian Kinerja TW I 2025 dan Pelaksanaan Operasional Perkreditan khususnya terkait dengan kredit NPL.		
3.	Tanggal Rapat	24 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pencapaian Kinerja TW II 2025 dan Pelaksanaan Operasional Perkreditan khususnya terkait dengan Penyaluran Kredit.		
4.	Tanggal Rapat	10 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Pencapaian Kinerja TW II 2025 dan Pelaksanaan Operasional Perkreditan khususnya terkait dengan Penyelesaian Kredit dan Penguatan Dana mengingat NPL yang sudah berada di atas 100%.		

Dari Januari sampai Desember 2025 Direksi sudah melakukan strategi untuk melakukan penagihan serta pencairan kredit sesuai target yang telah ditentukan.

### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

#### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Djodi suhardi
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Seluruh kegiatan rapat Dewan Komisaris tahun 2025 dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris

## 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	<b>0 kasus</b>

Hukum Pada Tahun Laporan

**1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap**

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

**1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap**

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	<b>0 kasus</b>

### Hukum Pada Tahun Laporan

Tidak Terdapat Kejadian Fraud selama Tahun 2025

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>1 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
--	----------------

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
--	----------------

Gugatan perdata BPR Kencana Mandiri Kepada BPR Artha Prima terkait dengan kelalaian proses penerimaan agunan Asli Debitur sindikasi telah diputuskan oleh pengadilan dengan hasil bahwa gugatan BPR Kencana Mandiri selaku penggugat tidak dikabulkan.

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil.

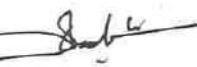
Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR KENCANA MANDIRI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 10 April 2026

**PT. BPR KENCANA MANDIRI**



Arie Kustiyarto  
Direktur



Djodi Suhardi  
Komisaris